



Masih Proses Survei Tempat

■ Penyediaan Dapur MBG Libatkan Mitra Strategis

YOGYA, TRIBUN - Penyediaan dapur untuk menggulirkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Yogyakarta bakal melibatkan sejumlah mitra strategis. Nantinya, mereka akan diberi tugas untuk menyediakan makanan setiap hari untuk para pelajar, ibu hamil, hingga anak pra-sekolah di Kota Yogya.

Wakil Ketua DPRD Kota Yogya, Sinarbiyat Nujanat mengatakan, saat ini unsur yang sudah dipastikan menyelenggarakan dapur untuk MBG adalah Kodim. Namun selain itu, beberapa mitra strategis juga bakal dilibatkan dalam penyediaan MBG, mulai koperasi, yayasan dan lain-lain.

"Saya kira khusus untuk Kota Yogya memang baru proses survei-survei, tempat mana yang sesuai aturan," katanya, Minggu (19/1).

Dalam kemitraan tersebut, setiap dapur setidaknya dapat menyediakan 3 ribu porsi makanan per hari, dari jumlah total sasaran 71 ribu penerima. Sebagai informasi, Kota Yogya kini menjadi satu-satunya daerah di DI Yogyakarta yang belum mulai menggelar program MBG.

"Kemudian jaraknya antara 3-5 kilometer itu, agar pendistribusiannya tak memakan waktu panjang, sehingga bisa terdistribusikan tepat waktu setiap hari," ujar



Saya kira khusus untuk Kota Yogya memang baru proses survei-survei, tempat mana yang sesuai aturan.

Sinar.

Lebih lanjut, politikus Partai Gerindra itu menegaskan, bakal mengawal penuh keberlangsungan program MBG di Kota Yogya. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto juga sudah menginstruksikannya pada pemerintah daerah, baik tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota.

"Maka, sudah menjadi kewajiban bagi seluruh pemerintah daerah untuk kemudian bisa ikut berpartisipasi dan terlibat secara langsung," lanjutnya.

"Ya, dalam fungsi pengawasan juga implementasi. MBG harus bisa terrealisasi dan berjalan dengan baik, sebagaimana mestinya," tandas Sinar.

Terpisah, Ustaz Dr Adi Hidayat menanggapi usulan penggunaan dana zakat untuk program MBG. Adi Hidayat meyakini pemerintah

sudah menyiapkan strategi menjalankan program MBG untuk siswa-siswi sekolah.

Namun ia menilai, pemanfaatan dana zakat untuk menambal alokasi anggaran program MBG perlu dikaji lebih dalam. "Itu sebenarnya sudah ada strateginya, termasuk anggaran tertentu yang bisa saja dikolaborasi dengan pihak, misalnya Baznas. Namun, ingat, catat baik-baik, kolaborasi ini tak boleh keluar dari aspek-aspek penerima zakat (mustahik)," jelasnya kepada awak media di Yogyakarta, Minggu (19/1).

Menurutnya, boleh saja dana zakat dialokasikan untuk program MBG, namun pemerintah harus memastikan siswa penerima MBG merupakan mustahik. Sebab, penyaluran dana zakat berdasarkan kajian para ulama harus mengutamakan delapan golongan mustahik.

"Ada delapan golongan penerima zakat. Jika delapan golongan ini terpenuhi, dana zakat bisa diformulasikan untuk membiayai program-program tersebut (MBG). Itu sah-sah saja dan tak ada masalah," ucapnya.

Sebagai contoh, Adi menyebut sekolah-sekolah dapat diidentifikasi apakah murid-muridnya memenuhi kualifikasi sebagai penerima zakat atau tidak. (aka/hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005